

## **Analisis Dampak Investasi Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Keuangan Negara: Studi Kasus Pembiayaan Infrastruktur**

**Bagus Anggit Saroyo<sup>1</sup>**

**Difa Ariedhita J.A<sup>2</sup>**

*difaariedhita2004@gmail.com*

**Tiara Fasya Afifah<sup>3</sup>**

**Universitas Negeri Yogyakarta**

### **ABSTRACT**

*The relocation of the Ibu Kota Negara (IKN) from Jakarta to East Kalimantan is a strategic initiative formulated by the Indonesian government to overcome challenges for the Indonesian nation and encourage equitable development throughout Indonesia. This project aims to create a modern, inclusive and sustainable government center, as well as optimize the potential of regions outside Java. Through investment in infrastructure development, transportation, energy and public services, it is hoped that IKN can accelerate national economic growth and create new jobs. Regulations that support investment in effective risk management are key to ensuring the success of these large projects. By involving all stakeholders, it is hoped that the transfer of IKN can be a step forward in creating more equitable and just development throughout Indonesia.*

**Keywords:** *Ibu Kota Negara; Investment; Sustainable development; Equality; East Kalimantan*

### **1. PENDAHULUAN**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan satu langkah strategis yang di formulasikan oleh Presiden Jokowi untuk menghadapi tantangan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Proyek pembangunan ini tidak hanya sekedar relokasi administratif saja, tetapi juga merupakan upaya besar untuk mengembangkan tingkat perekonomian nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan yang selama ini terfokuskan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan IKN, pemerintah berharap dapat membuka pusat perekonomian baru yang mampu untuk mengurangi beban bagi Kota Jakarta serta mengoptimalkan potensi yang ada di daerah- daerah lain di luar Pulau Jawa.

Investasi yang diarahkan untuk proses pembangunan IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Investasi merupakan kegiatan penanaman atau penyimpanan modal atau dana dengan jangka waktu periode tertentu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Abi,2016). Melalui alokasi anggaran yang cukup signifikan, proyek pembangunan ini bertujuan untuk menambah infrastruktur dan memperkuat aksesibilitas di wilayah-wilayah yang sebelumnya masih kurang berkembang. Selain itu pemindahan IKN ini juga dianggap sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dinamika global, seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang semakin cepat.

Namun, pemindahan IKN ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kesiapan infrastruktur dan kolaborasi dengan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur yang memadai tersedia untuk mendukung aktivitas dan kinerja pemerintahan dan perekonomian di wilayah IKN. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan sektor swasta, diharapkan proyek besar pemindahan IKN dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Analisis dampak investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap keuangan negara dapat dikaji melalui berbagai teori dalam administrasi publik. Teori manajemen keuangan publik membahas bagaimana pemerintah mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel, terutama melalui

skema pembiayaan seperti Public-Private Partnership (PPP) atau penerbitan sukuk negara. Selain itu, teori good governance menekankan perlunya tata kelola yang baik dalam pembangunan IKN agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya berjalan akuntabel dan bebas dari korupsi.

Dalam sudut pandang ekonomi pembangunan, teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa investasi infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pemerataan ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect). Namun, dampak tersebut perlu dianalisis dari sisi eksternalitas, baik positif seperti pembukaan lapangan kerja, maupun negatif seperti potensi peningkatan beban fiskal atau dampak lingkungan. Sementara itu, teori kebijakan publik, khususnya teori analisis dampak kebijakan, digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan investasi IKN memengaruhi pendapatan negara, anggaran, dan keberlanjutan fiskal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam mengolah dan menganalisis data yang sudah didapatkan. Penelitian ini akan berfokus pada dampak dari adanya investasi IKN terhadap keuangan negara. Analisis akan dilakukan menggunakan data sekunder yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber terkait yang mengandung informasi relevan untuk mendukung penelitian ini (Silalahi,2009). Keseluruhan data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui beberapa tahapan yang dikembangkan oleh Miles&Huberman (1992:16) dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Dari data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Investasi pada Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur sangat penting dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Pemindehan IKN dari Provinsi Jakarta ke Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Jakarta, seperti kemacetan dan juga polusi, akan tetapi juga untuk melakukan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa agar semakin merata. Dengan memindahkan IKN, pemerintah berharap pemindahan ini dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga mengurangi kesenjangan antara Jawa dan daerah lainnya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berfokus pada inklusivitas dan keberlanjutan.

Investasi di IKN diharapkan dapat menciptakan dampak peningkatan ekonomi yang signifikan. Menurut estimasi, proyek pembangunan di IKN akan melibatkan anggaran yang sangat besar, yaitu mencapai Rp 466 triliun, yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur, perumahan, dan fasilitas publik. Selain itu, pembangunan IKN juga diharapkan dapat menarik investasi dari pihak swasta dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, yang pada jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian lokal dan nasional. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi simbol identitas baru bagi Bangsa Indonesia, tetapi juga dapat bermanfaat sebagai motor penggerak bagi pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.

Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sector keuangan negara, terutama melalui peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan pajak dan retribusi. Proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangun di IKN diharapkan dapat menjadi daya tarik banyak investor, baik investor domestik maupun investor asing, yang akan ikut berkontribusi pada basis pajak negara. Dengan adanya insentif perpajakan yang ditawarkan, pemerintah berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sector pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, investasi di IKN juga dapat berpotensi untuk menekan biaya logistik, yang merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian. Dengan infrastruktur yang lebih baik, efisiensi dalam

distribusi barang dan jasa akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi biaya operasional bagi perusahaan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik dan internasional, tetapi juga dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan negara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diterapkan dalam proyek IKN memungkinkan pemerintah untuk diversifikasi sumber pendanaan. Dengan melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan proyek di IKN, pemerintah dapat mengurangi beban anggaran yang dikeluarkan negara dan memfokuskan anggaran pada sektor-sektor lain yang juga penting. Pendekatan ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas keuangan negara, tetapi juga memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan di IKN dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian nasional di Indonesia.

### **Data Investasi**

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur membutuhkan investasi total sebesar Rp100 triliun untuk mewujudkan visi sebagai pusat pemerintahan modern dan kota berkelanjutan. Hingga saat ini, beberapa tahap groundbreaking telah dilakukan untuk merealisasikan investasi dari berbagai sektor dan mitra strategis. Pada groundbreaking pertama, dana sebesar Rp23,1 triliun berhasil dihimpun dari perusahaan besar seperti Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group. Investasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, termasuk gedung pemerintahan dan fasilitas penunjang lainnya.

Tahap kedua menyumbangkan Rp13,1 triliun melalui kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Mayapada Hospital, Hermina, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN. Proyek ini meliputi pengembangan fasilitas transportasi, layanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang akan menopang kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Pada groundbreaking ketiga, investasi senilai Rp10 triliun didapatkan dari para investor lokal Kalimantan, menunjukkan komitmen masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam pembangunan wilayahnya. Tahap keempat melibatkan Pos Indonesia dan RRI dengan total nilai investasi Rp4,9 triliun yang diarahkan untuk mendukung sistem komunikasi dan logistik modern di IKN. Tahap kelima mendatangkan investasi sebesar Rp2,1 triliun dari sektor perbankan, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Kaltimtura. Investasi ini dirancang untuk memperkuat sektor keuangan dan layanan perbankan yang akan menjadi tulang punggung ekonomi lokal di IKN. Tahap keenam menjadi tonggak penting dengan investasi terbesar sejauh ini, yaitu Rp51,35 triliun. Pada tahap ini, proyek pendidikan menjadi fokus utama, termasuk pembangunan Bina Bangsa School, Universitas Gunadarma, dan Sekolah Islam Al-Azhar. Proyek-proyek ini dilengkapi dengan fasilitas canggih seperti laboratorium, gedung olahraga, dan pusat riset energi berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara Pertamina dan Bakrie Group. Selain itu, sektor pendukung seperti telekomunikasi, perbankan, dan fasilitas gaya hidup turut dikembangkan, misalnya pembangunan Central Telecommunication Office oleh PLN Icon Plus dan fasilitas F&B oleh Arena Lifestyle. Pada tahap ketujuh, investasi sebesar Rp5,375 triliun diarahkan pada pembangunan kawasan mix-use, seperti kantor BCA, Swiss-Belhotel, dan Nusantara International Convention Center oleh Royal Golden Eagle Group. Sementara itu, tahap kedelapan dengan total investasi Rp1,57 triliun berfokus pada sektor pendidikan dan perhotelan, seperti pembangunan Australian Independent School (AIS) Nusantara dan kompleks komersial Delonix Nusantara.

Melalui serangkaian investasi ini, pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol pemindahan pusat pemerintahan tetapi juga bertujuan menciptakan kota modern yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun sudah ada kemajuan yang signifikan, tantangan utama seperti percepatan realisasi investasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan harus terus diatasi agar pembangunan berjalan sesuai target.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) adalah kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden

Jokowi untuk menjawab tantangan masa depan pembangunan di Indonesia. Proyek ini bukan hanya sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini lebih banyak terfokus di Pulau Jawa. Dengan adanya IKN, pemerintah berharap dapat menciptakan pusat ekonomi baru yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan memperluas akses ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang. Melalui program investasi di IKN, pemerintah mengundang sektor publik dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk ikut mendanai pembangunan fasilitas utama, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan layanan masyarakat lainnya. Investasi ini ditargetkan dapat mempercepat perkembangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Dampak dan Resiko**

Dampak yang dirasakan dengan jangka waktu kurang lebih 5 tahun dari pembangunan Ibu Kota Negara yaitu 0,1-0,2% pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat menurut beberapa kajian Bappenas karena adanya dorongan investasi baru. Hal ini tentunya berpengaruh kepada inflasi di Indonesia yang meningkat, namun itu semua juga berpengaruh terhadap tahapan perencanaan yang harus benar-benar dipersiapkan dengan aman. Peningkatan inflasi dibersamai dengan naiknya harga kebutuhan pokok di sekitar daerah Ibu Kota Negara hal ini karena pendapatan publik yang meningkat.

Tujuan utama mengenai pembagian beban kota sebagai pusat bisnis di DKI Jakarta dan pusat pemerintahan di Kalimantan hal ini bermanfaat juga mengenai pemerataan penduduk. Bahwasanya kepadatan penduduk merupakan masalah daerah mengenai menghambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tingkat nasional, menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Terlalu padat akan penduduk tentunya permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Dengan dibangunnya Ibu Kota Negara harapannya tercapainya keselarasan ekonomi atas perbandingan yang tidak ideal antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Terdapat resiko mengenai pemindahan Ibu Kota Negara yaitu terkait daerah yang akan dibangun IKN minimnya infrastruktur yang memadai, sehingga pemerintah harus menyelenggarakan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga biaya yang dikeluarkan cukup besar. Walaupun dari awal pemerintah mengatakan hanya 19,2% dari total dari seluruh total Rp446 T dipertanggungjawabkan oleh APBN. Terjadinya kegagalan pembangunan oleh swasta itu menjadi resiko mengenai pemindahan IKN karena akan berdampak pada penambahan beban anggaran.

## **5. PENUTUP**

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan modern, IKN juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi melalui investasi besar di berbagai sektor, seperti infrastruktur, transportasi, layanan publik, pendidikan, dan perbankan. Dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban APBN tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal maupun nasional.

Namun, proyek ini juga memiliki tantangan, seperti risiko ketergantungan pada swasta, potensi inflasi, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan sesuai target. Di sisi lain, dampak positif yang diharapkan, seperti pemerataan penduduk, efisiensi logistik, dan peningkatan pendapatan pajak, menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi memberikan manfaat besar bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan matang, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kerja sama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayyubi, M., Perwira, I., & Abdurrahman, A. (2023). The Juridical Impact of the Implementation of the Paradigm Regarding the Determination of the National Capital (IKN) of the Archipelago as an Asymmetric Region. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 140-158.
- Budiman, dkk. (2022). Framing Wacana Politik Ekologis: Pembangunan Berkelanjutan Ibu Kota Negara Baru Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)* Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Hal. 155-174.
- Carolina, N. (2023). Healthy City: Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Menuju Indonesia Sehat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 68-72.
- Editha, P., Firre An, S., Yusuf, A., Surachman, S., & Rui, D. (2023). Nusantara Capital City (Ikn): Threats And Defense Strategies For Indonesia's New Capital. *Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(1), 21-34.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183-203.
- Julaika, T & Suyatno (2024). Acceleration of Increased Investment between the Government and Business Entities Spurring Economic Growth. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024
- Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., & Wijaya, A. K. (2023). Forecasting the development of IKN (new national capital) in sustainable development, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 48-59.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh investasi asing dan investasi dalam negeri terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137-145.
- Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. K., Taryana, D., & Ratnawati, N. (2021). The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. In *Development, Social Change and Environmental Sustainability* (pp. 57-61). Routledge.
- Laksono, N. B., & Latief, Y. (2024). Sustainable Infrastructure Development in The IKN Region (Nusantara Capital): Simulation of The Smart Self-Sustaining Urban Center Area Development. *Smart City*, 4(1), 3.
- Marzuki, M., Ramadhan, R., Yusnaini, H., Vonnisa, M., Safitri, R., & Yanfatriani, E. (2023). Changes in extreme rainfall in new Capital of Indonesia (IKN) based on 20 years of GPM-IMERG data. *Trends in Sciences*, 20(11), 6935-6935.
- Putri, A. S., Indrawati, M., & Rusdiyanto, R. (2024). Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik Dan Asing. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1-12.
- Praditya, E., Suprpto, F. A., Ali, Y., Surjaatmadja, S., & Duarte, R. (2023). Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia's New Capital. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(1), 21-34.
- Rahmawati, A., & Nugraha, D. (2024). Analisis investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45-58.
- Ramadhani, A.P., dkk. (2022). Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 3, No. 12, Desember 2022. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i12.746>
- Setiawan, A., & Sukardi, D. (2022). The economic impact of relocating Indonesia's capital city: A cost-benefit analysis. *Indonesian Journal of Development Planning*, 6(3), 329-348. <https://doi.org/10.36574/jpp.v6i3.238>
- Sobari, W., Priandani, N. D., & Pohan, I. A. (2024). Level of Regional Governments' Readiness to Deal with The Fourth Industrial Revolution Challenges: An E-Service Analysis. *Journal of Local Government Issues*, 7(1), 37-53.

- Sukandi, A. (2024). Analysis of Opportunities and Challenges for Subang City within the Framework Rebana Triangle Economic Region. *Journal of Law, Social Science and Humanities* Vol. 2, No. 1, July - December (2024), pp. 68-83
- Venter, C., Jennings, G., & Hidalgo, D. (2021). Decentralized governance and sustainable urban planning: The case of new capital cities. *Urban Studies*, 58(3), 603–620. <https://doi.org/10.1177/0042098020917028>